

PELAKSANAAN ISOLASI MANDIRI (ISOMAN) DI FASILITAS ISOLASI MILIK PEMERINTAH DAERAH

IMPLEMENTATION OF SELF-ISOLATION AT THE LOCAL GOVERNMENT'S ISOLATION FACILITY

Afriyanni¹, Viviyanti², Roselly Evianty Silalahi³, Sinta Buana⁴, Eva Yulieta Deliana⁵

^{1,2}Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru, Pekanbaru, Indonesia

³Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Pekanbaru, Indonesia

⁴Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Pekanbaru, Indonesia

⁵Puskesmas Senapelan, Pekanbaru, Indonesia

Email : afriyannisubhan@gmail.com¹, vviyanti@gmail.com², evianty766@gmail.com³, scholastica.yap@gmail.com⁴, yulieta.eva@gmail.com⁵

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan isoman di fasilitas isolasi milik pemerintah daerah berdasarkan persepsi pasien terkonfirmasi Covid-19 yang melaksanakan isoman di fasilitas isolasi milik pemerintah daerah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatoris sekuensial. Metode kuantitatif menggunakan *survey online* sedangkan metode kualitatif menggunakan studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi. Analisis Data kuantitatif dilakukan menggunakan analisis statistik deskriptif berupa tabel frekuensi maupun grafik. Analisis kualitatif dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis kualitatif ditujukan untuk menjelaskan hasil analisis kuantitatif. Hasil penelitian menemukan terdapat sarana dan prasarana di fasilitas isolasi mandiri yang perlu ditingkatkan yaitu: sarana hiburan dan internet, olah raga dan pengelolaan sampah serta limbah infeksius. Sebagian besar responden menilai pelayanan petugas di fasilitas isoman sangat baik (62,71%) namun pemenuhan kebutuhan pasien data dan internet 42,37%) serta hiburan (66,10%) masih dinilai kurang baik. Pelaksanaan isoman di fasilitas isolasi mandiri milik pemerintah daerah dipengaruhi oleh partisipasi dan kepatuhan masyarakat, penegakan sanksi, dukungan finansial, ketersediaan sarana prasarana di fasilitas isoman, data dan informasi serta koordinasi antar stakeholders terkait. Berdasarkan hasil temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal antara lain peningkatan sarana dan prasarana fasilitas isoman, ketersediaan dukungan pemerintah terhadap pasien isoman baik finansial maupun non finansial, penguatan koordinasi antar Satgas COVID-19 secara berjenjang dan peningkatan kualitas data dan informasi.

Kata Kunci : *implementasi, isolasi mandiri, COVID-19, fasilitas isolasi milik pemerintah daerah, Pekanbaru*

Abstract: *This study aims to evaluate the implementation of self-isolation in local government isolation facilities based on the perception of Covid-19 in Pekanbaru City. This research combines quantitative and qualitative research methods with sequential explanatory research. The quantitative method uses online surveys while the qualitative method uses documentation studies, in-depth interviews, and observations. Analysis of quantitative data was carried out using descriptive statistical analysis in the form of frequency tables and graphs. Qualitative analysis was carried out through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. Qualitative analysis is intended to explain the results of quantitative analysis. The results of the study found that there are infrastructures of local government isolation facilities that still need to be improved, namely: entertainment and internet facilities, sports and waste management, and infectious waste. Most of the respondents assessed that the service at the local government isolation facilities was very good (62.71%) but the fulfillment of patient needs for data and internet was 42.37%) and entertainment (66.10%) was still not good. Implementation of self-isolation at the local government facilities is influenced by community participation and compliance, enforcement of sanctions, financial support, availability of facilities, data, and information, and coordination between relevant stakeholders. Based on these findings, this study recommends several things, including improvement of infrastructure in the local government self-isolation facilities, the availability of government support for self-isolation patients, both financial and non-financial, strengthening coordination between the COVID-19 Task Force, and improving the quality of data and information.*

Keywords: *implementation, self-isolation, COVID-19, local government self-isolation facilities, Pekanbaru:*

PENDAHULUAN

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) merupakan bencana kesehatan dunia yang berdampak terhadap kesehatan, ekonomi dan sosial (Smith & Lim, 2020) dan mengakibatkan lebih dari 170 juta orang terkonfirmasi COVID-19 dan 3,5 juta orang meninggal (WHO, 2021). Kondisi yang hampir sama juga terjadi di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi meningkat hingga mencapai 1,8 juta orang pada 1 Juni 2021 dan lebih dari 50 ribu orang meninggal (Covid19.go.id, 2021).

Untuk mengendalikan pandemi COVID-19, pemerintah telah melakukan berbagai strategi kebijakan yang diterapkan secara nasional sampai lokal. Salah satu strategi yang dinilai efektif mengendalikan pandemi COVID-19 adalah kebijakan isoman di fasilitas isolasi terpusat (Arden et al. 2020).

Berbagai sarana dan prasarana publik dialihfungsikan menjadi fasilitas isoman bagi pasien terkonfirmasi COVID-19. Strategi ini membantu mengurangi beban sistem pelayanan kesehatan (Singh 2020), memudahkan pemantauan baik kondisi klinis maupun riwayat kontak pasien terkonfirmasi COVID-19 namun berdampak terhadap psikologis (Reagu et al. 2021), (Bezerra 2020), (Omiya 2020) dan ekonomi pasien (Nicola et al. 2020). Bahkan minimnya dukungan finansial maupun non finansial terhadap pasien yang melakukan isoman semakin memperburuk dampak tersebut khususnya bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi (Amirudin 2021). Selain itu strategi ini juga berdampak pada peningkatan kebutuhan anggaran dan SDM pada sistem kesehatan (Bhardwaj et al. 2021), (Ambarwati 2021).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pelaksanaan kebijakan isoman di fasilitas isolasi perlu memiliki manajemen yang baik untuk menjamin efektivitasnya dalam pengendalian wabah COVID-19 serta mengurangi dampak negatif bagi pasien. Evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan isoman di fasilitas isolasi milik pemerintah daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan manajemen dan efektivitas layanan fasilitas isolasi dalam rangka pengendalian COVID-19.

Lonjakan cukup signifikan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Provinsi Riau terjadi selama periode Maret s.d Mei 2021.

Puncaknya selama 2 (dua) hari berturut-turut Provinsi Riau mencatatkan penambahan kasus harian tertinggi di Indonesia dengan 739 kasus pada tanggal 26 Mei 2021 dan 810 kasus pada tanggal 27 Mei 2021. Kondisi ini menempatkan Provinsi Riau termasuk 10 besar wilayah di Indonesia dengan jumlah kasus terkonfirmasi tertinggi. Sebagian besar jumlah kasus tersebut disumbangkan oleh Kota Pekanbaru (Dinas Kesehatan, 2021).

Untuk mengurangi beban fasilitas layanan kesehatan dan mengendalikan pandemi COVID-19, Pemerintah Kota Pekanbaru dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau telah mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya adalah mengalihfungsikan beberapa fasilitas milik pemerintah daerah sebagai tempat isolasi mandiri bagi pasien tanpa gejala atau bergejala ringan. Fasilitas isolasi milik Pemerintah Provinsi Riau berjumlah 4 (empat) unit, yaitu : Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) , Lembaga Pengendalian Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Riau, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau dan Asrama Haji mulai difungsikan mulai 1 Juni 2021 sebagai fasilitas karantina dan isolasi mandiri bagi pelaku perjalanan. Selanjutnya fasilitas isolasi milik Pemerintah Kota Pekanbaru berjumlah 1 (satu) unit yaitu Rusunawa Rejosari. Ketersediaan fasilitas isoman di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Ketersediaan Fasilitas Isolasi Mandiri di Kota Pekanbaru per Tanggal 1 Juni 2021

Fasilitas Isolasi Mandiri	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1 Bapelkes	38	65
2 LPMP	63	138
3 BPSDM	37	74
4 Asrama Haji	??	75
5 Rusunawa Rejosari	31	50
Jumlah Total	169	327

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2021.

Namun pelaksanaannya sepanjang pengetahuan peneliti belum dievaluasi. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi pelaksanaan isoman di fasilitas isolasi milik pemerintah daerah sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan efektivitas isoman. Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian yang berjudul: “Evaluasi Pelaksanaan Isoman sebagai Upaya Pengendalian Covid-19 di Kota Pekanbaru. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan isoman di fasilitas isolasi milik pemerintah daerah yang dijabarkan kedalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Kondisi fasilitas isolasi milik pemerintah daerah?
2. Bagaimana persepsi pasien isoman terhadap sarana dan prasarana di fasilitas isoman milik pemerintah daerah?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan isoman di fasilitas isolasi milik pemerintah daerah?

METODE

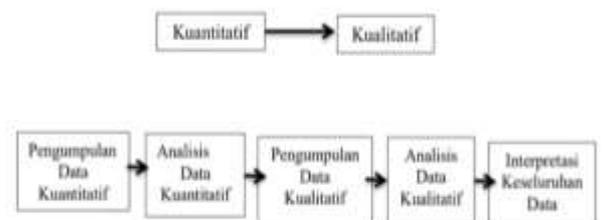
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru selama 6 (enam) bulan dari Bulan Juli s.d Desember 2021. Penelitian ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif atau metode campuran (mixed methodology) dengan jenis eksplanatoris sekuensial. Metode kuantitatif dilakukan melalui *survey online* menggunakan *google form* untuk mengetahui karakteristik responden, alasan melakukan isolasi, persepsi terhadap fasilitas isoman dan pemenuhan kebutuhan responden serta layanan petugas. Populasi penelitian adalah orang yang terkonfirmasi Covid-19 sedangkan sampelnya adalah orang yang menjalani isoman di fasilitas isolasi milik pemerintah daerah, yaitu: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) dan Rusunawa Rejosari.

Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Jumlah responden yang mengisi survey online berjumlah 121 orang namun yang melakukan isolasi mandiri di fasilitas isolasi milik pemerintah daerah berjumlah 59 responden. Uji validitas dan realibilitas instrumen penelitian dilakukan pada tahap uji coba kuesioner dan akhir survey sebelum dilakukan analisis data. Analisis data

dilakukan menggunakan statistik deskriptif berupa grafik maupun tabel frekuensi.

Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan hasil temuan kuantitatif melalui studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Informan berasal dari Satgas Penanganan COVID-19 secara berjenjang dari tingkat Provinsi sampai RT/RW, Babinsa dan Babinkamtibmas. Pemilihan informan dipilih secara purposive sampling, yaitu orang atau pejabat yang dianggap paling mengetahui terkait penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru.

Jumlah informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 25 orang. Wawancara kepada isoman dilakukan secara online maupun offline. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada responden yang bersedia sebagai informan. Uji keabsahan data kualitatif dilakukan dengan teknik triangulasi dan *member checking*. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, pemilahan, penyajian dan penarikan kesimpulan. Kemudian analisis data kuantitatif di gabungkan dengan analisis data kualitatif untuk menjelaskan hasil temuan kuantitatif sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Metodologi Penelitian Mixed Method Eksplanatoris Sekuensial
Sumber: Olahan Peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Umum Fasilitas Isolasi Milik Pemerintah Daerah

Untuk mengantisipasi lonjakan Covid-19, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru mengalihfungsikan beberapa fasilitas publik menjadi fasilitas isoman bagi pasien Covid-19. Fasilitas publik yang dialihfungsikan oleh Pemerintah Provinsi Riau, yaitu :yaitu Lembaga Pengendalian Mutu Pendidikan (LPMP), Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Asrama Haji.



Gambar 2. Fasilitas Isolasi Milik Pemerintah Provinsi Riau
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2021

Kondisi keempat fasilitas isolasi tersebut secara fisik cukup baik dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai dan terletak ditengah kota sehingga mudah diakses oleh masyarakat (Gambar 2.). Menurut Wang et al., (2021) risiko penularan lingkungan dan penduduk terdekat perlu menjadi pertimbangan dalam memilih fasilitas isolasi. Namun pertimbangan ini agak sulit dilakukan mengingat ketersediaan fasilitas publik yang sesuai dengan persyaratan tersebut sangat terbatas.

Selanjutnya Pemerintah Kota Pekanbaru mengalihfungsikan Rusunawa Rejosari menjadi fasilitas isoman mulai bulan Agustus 2020. Fasilitas isolasi ini memiliki kapasitas 320 kamar dilengkapi dengan dilengkapi dengan wifi dan TV pada masing-masing lantai sebagai sarana hiburan dan komunikasi pasien. Namun demikian fasilitas isolasi ini masih memiliki fasilitas terbatas seperti sarana olah raga dan ruang parkir serta agak jauh dari pusat kota (lihat Gambar 3).



Gambar 3. Fasilitas Isolasi Milik Pemerintah Kota Pekanbaru
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, 2021

Lokasi yang strategis dan akses yang mudah, serta sarpras yang memadai dan nyaman menjadi pertimbangan bagi pasien

terkonfirmasi COVID-19 untuk melakukan isoman di tempat tersebut. Namun demikian, pemerintah daerah berupaya untuk membenahi sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan kebutuhan pasien isoman sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana hasil wawancara dengan informan berikut:

“...terkait tempat isoter memang disitu persoalannya pertama memang disitu tempatnya jauh, kemudian karena ini pandemik tentu segala sesuatunya tidak direncanakan tapi rusunawa telah berbenah diri dia memperbaiki sarana dan prasarana yang ada disitu. Ketika masyarakat tidak mau isoter ke rusunawa itu mereka memiliki pilihan lain ada asrama haji, LPMP, yang dekat-dekat kota. Tapi ketika tempat ini full itu tentupilihan terakhirnya adalah rusunawa. Kami dari pemko sudah melakukan berbagai apa sikap terkait renovasi gedung di rusunawa dan melengkapi sarana dan prasarana yang ada di rusunawa mudah-mudahan mungkin kalo terjadi outbreak lagi mungkin tempat itu udah bisa layak dan nyamanlah di gunakan sebagai isoter”
(Hasil Wawancara dengan A, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, tanggal 26 Oktober 2021)

Untuk mendukung pelayanan pasien maupun operasional di fasilitas isoman, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru telah menempatkan petugas yang terdiri dari dokter, perawat, petugas kebersihan, petugas keamanan, tenaga administrasi, apoteker, teknisi dan sopir di fasilitas isolasi milik pemerintah daerah sebagaimana dilihat pada Tabel 1. Kapasitas kamar dan Jumlah SDM pendukung layanan di fasilitas isolasi milik pemerintah daerah dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.

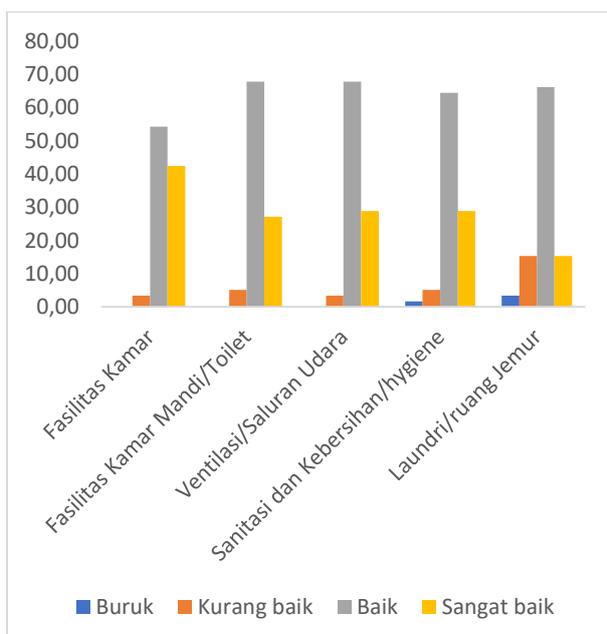
Tabel 2. Jumlah SDM Pendukung Layanan dan Operasional di Fasilitas Isolasi Milik Pemerintah Daerah

No.	Nama Fasilitas	Kapasitas Kamar	Jumlah SDM				
			Dokter	Perawat	Kebersihan	Kemaman	Lainnya*
1.	LPMP	148	3	9	4	6	3
2.	Bapelkes	36	4	5	4	6	3
3.	BPSDM	76	3	18	4	6	3
4.	Asrama Haji	514	4	34	14	6	4
5.	Rusunawa Reysari	180	3	20	20	6	14

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2021

Keterangan: *PPI, Desinfektan, Apoteker, teknisi, sopir

Penelitian ini menggali informasi terkait persepsi responden terhadap sarana dan prasarana di fasilitas isolasi milik pemerintah daerah. Hasil penelitian menemukan bahwa secara umum sebagian besar responden menilai sarana dan prasarana di fasilitas isolasi milik pemerintah daerah sudah baik namun masih terdapat sarana dan prasarana yang masih perlu dioptimalkan seperti laundry /ruang jemur, sanitasi dan kebersihan/hygiene serta fasilitas kamar mandi/toilet. Persepsi Responden terhadap Sarana dan Prasarana di fasilitas isolasi milik pemerintah daerah dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Persepsi terhadap Sarana dan Prasarana di Fasilitas Isolasi Milik Pemda Daerah

Sumber : Hasil Survei 2021, data diolah

Fasilitas isolasi milik pemerintah daerah pada awalnya merupakan sarana publik yang dialihfungsikan menjadi fasilitas isolasi sehingga secara infrastruktur tidak memenuhi

persyaratan sebagai tempat isolasi seperti saluran drainase yang terbuka, tempat pembuangan sampah dan pengelolaan limbah cair. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif, diketahui bahwa pengelola tidak menyediakan laundry untuk pasien kecuali laundry khusus untuk alas kasur dan sarung bantal. Oleh karena itu, pasien mencuci pakaian sendiri dan tidak dibenarkan dibawa keluar. Lebih lanjut informan membenarkan tidak tersedia ruang jemur khusus bagi pasien di tempat isolasi (lihat Gambar 5.).



Gambar 5. Area Jemur pada salah satu fasilitas isolasi milik pemerintah

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Sanitasi dan Kebersihan/Hygiene juga menjadi perhatian responden yang pernah menjalani isoman di fasilitas isolasi milik pemerintah daerah khususnya terkait pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil observasi lapangan masih terdapat pengelolaan sampah yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, masalah koordinasi pengelolaan sampah antar SKPD, partisipasi pasien isoman dalam mengelola sampahnya, serta masalah lamanya waktu tunggu sampah infeksius diangkut untuk dimusnahkan.

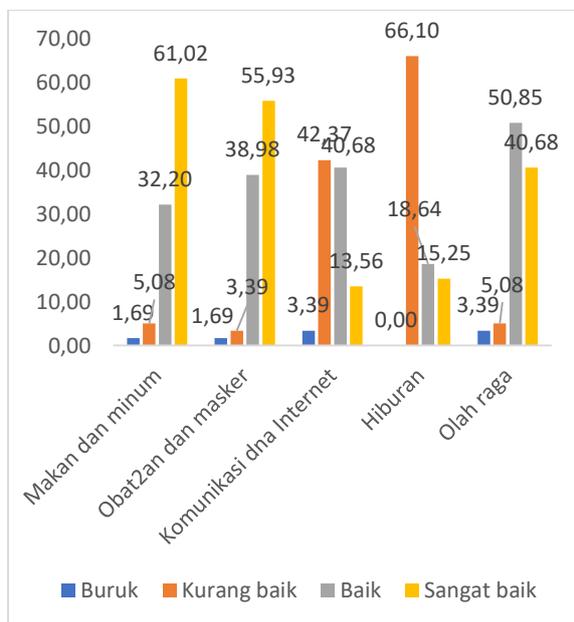
2. Persepsi terhadap Pelayanan di Fasilitas Isoman

Persepsi pasien terhadap pelayanan di fasilitas isoman dalam penelitian ini ditinjau dari pemenuhan kebutuhan pasien dan layanan petugas kesehatan. Pemenuhan kebutuhan pasien di fasilitas isoman meliputi makan dan minum, obat-obatan dan masker, komunikasi dan internet, hiburan dan olah raga. Sementara untuk layanan kesehatan mencakup pengecekan kesehatan kondisi klinis pasien secara berkala terkait tekanan darah, suhu dan kadar oksigen dalam darah serta keluhan klinis.

Secara umum persepsi responden terhadap pemenuhan kebutuhan pasien di

fasilitasi isoman makanan dan minuman, obat2an dan masker bagi pasien di fasilitas isolasi milik pemerintah daerah dinilai sangat baik demikian juga pemenuhan kebutuhan olah raga dinilai baik. Sementara itu sebagian besar responden menilai pemenuhan kebutuhan hiburan maupun pemenuhan kebutuhan komunikasi dan internet masih kurang baik.

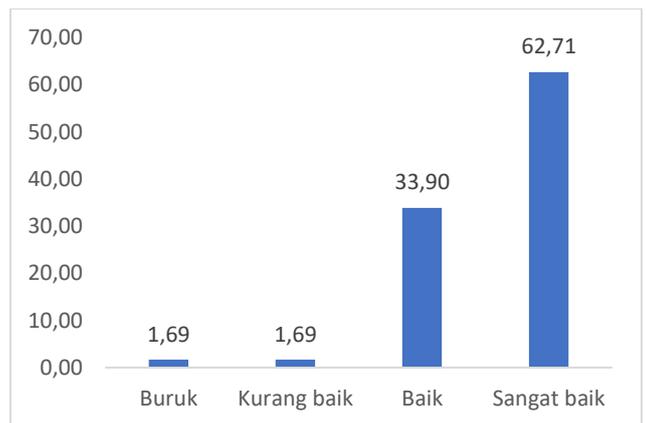
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengelola di fasilitas isolasi milik pemerintah Provinsi Riau diketahui bahwa memang difasilitas isoman tidak ada wifi atau internet namun masing-masing lobi terdapat televisi sebagai sarana hiburan bagi pasien isoman. Sementara untuk memenuhi kebutuhan olah raga setiap hari jika kondisi cuaca baik ada jadwal senam pagi bersama yang dipimpin oleh salah seorang tenaga medis di fasilitas isoman selain itu pasien dapat melakukan olahraga secara mandiri menyesuaikan dengan kondisi fasilitas isolasi.



Gambar 6. Persepsi terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pasien di Fasilitas Isolasi Milik Pemerintah Daerah

Sumber : Hasil Survei 2021, data diolah

Sebaliknya pada fasilitas isolasi milik pemerintah Kota Pekanbaru, telah disediakan fasilitas wifi atau internet dan TV pada masing-masing lantai sebagai sarana hiburan sedangkan untuk kebutuhan olahraga masih belum rutin dilaksanakan karena keterbatasan petugas instruktur senam.



Gambar 8. Persepsi terhadap Pelayanan Petugas Kesehatan di Fasilitas Isolasi Milik Pemerintah Daerah

Sumber : Hasil Survei 2021, data diolah

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa kebijakan pada fasilitas isoman milik pemerintah Provinsi Riau berbeda dengan kebijakan fasilitas isolasi milik pemerintah daerah. Mengingat sebaran responden sebagian besar merupakan responden yang pernah menjalani isoman di milik pemerintah provinsi sehingga kondisi yang sebenarnya tidak muncul dari hasil penelitian kuantitatif namun diperoleh dari penelitian kualitatif.

Selanjutnya dilihat dari persepsi responden terhadap pelayanan petugas kesehatan di fasilitas isolasi milik pemerintah daerah lebih dari separuh responden menyatakan sangat baik dan hanya sedikit (1,69%) yang menyatakan buruk. Persepsi responden terhadap mutu pelayanan menunjukkan kepuasan responden terhadap pelayanan yang diberikan difasilitas isolasi milik pemerintah daerah yang bersifat subyektif (Umniyati 2010).

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Isoman di Fasilitas Isoman Milik Pemerintah Daerah

a. Partisipasi dan Kepatuhan masyarakat

Partisipasi dan kepatuhan masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 untuk melakukan isoman dan mematuhi protokol

kesehatan berperan penting dalam mendukung keberhasilan pengendalian COVID-19 di Kota Pekanbaru. Hal ini sejalan dengan hasil temuan Agustiono (2020) yang menemukan salah satu hambatan dalam upaya pengendalian COVID-19 adalah belum optimalnya dukungan masyarakat. Kepatuhan ini juga dipengaruhi oleh faktor individu seperti jenis kelamin, pendidikan, usia, status ekonomi, lingkungan fisik, akses informasi, prasangka nilai dan orientasi individu dan kolektif (Escandon-Barbosa 2021), ciri-ciri kepribadian, status perkawinan (Zhang and Wang 2015) termasuk faktor budaya.

Menurut (Reagu et al. 2021), (Patel, Fernandes, and Sridhar 2021) beberapa alasan yang dikemukakan oleh masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan maupun isoman ketika terkonfirmasi COVID-19 adalah alasan ekonomi, alasan psikologis dan lemahnya dukungan. Alasan tersebut juga ditemukan dari hasil penelitian ini sebagaimana diungkapkan pada hasil wawancara dengan seorang petugas puskesmas berikut:

“...ada kendala di lapangan masyarakat belum semuanya mau dan bersedia kita masukkan ke isoter. Salah satu itu pendapat mereka merasa pisah dengan keluarga. Apalagi yang terkena itu hanya kepala keluarga. Jika kepala keluarga yang kita masukkan ke isoter otomatis mereka biaya kehidupan sehari-hari. Ketika dia dimasukkan ke isoter keluarga mau makan apa. (Hasil wawancara dengan petugas puskesmas Rejosari, M tanggal 17 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa selain alasan ekonomi dan psikologis, sarana dan prasarana fasilitas isolasi yang kurang nyaman juga menjadi pertimbangan bagi pasien terkonfirmasi COVID-19 melakukan isoman di fasilitas isolasi milik pemerintah daerah sebagaimana hasil wawancara dengan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

b. Penegakan Sanksi

Untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam upaya pengendalian

COVID-19, pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak Corona Virus Disease 2019 dan Surat Keputusan Waikota Nomor 180 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Isoman. Dalam aturan tersebut secara tegas menetapkan adanya sanksi yang diberlakukan bagi masyarakat, dunia usaha maupun PNS yang melanggar ketentuan tersebut. Sanksi dilakukan baik berupa sanksi administratif dan sanksi sosial namun dalam pelaksanaannya dilapangan penegakan perda tersebut belum optimal. Hasil wawancara dengan petugas puskesmas

Untuk penanggulangan covid yang utama yaitu tadi gerakan 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas) itu paling penting yang kita sosialisasikan dan untuk itu ada penegasannya mungkin. Ya karena ini masyarakat kita sampaikan, kita arahkan itu mungkin sudah berulang-ulang kita lakukan. Tidak ada sanksi atau bagaimana membuat mereka lebih lalai karena juga tidak ada sanksi yang jelas bagi mereka untuk memakai masker atau mereka membuat kerumunan jadi itu perlu lagi sedikit ketegasan utk tetap melakukan 5M tadi (wawancara dengan M, petugas puskesmas)

Hasil penelitian menemukan meskipun sosialisasi terkait Gerakan 5M telah sering dilakukan namun belum tegasnya penegakan sanksi menyebabkan masyarakat lalai dan tidak patuh terhadap protokol yang telah ditetapkan. Ahmad Fauzi (2020) berpendapat untuk mewujudkan penegakan sanksi dibutuhkan dasar hukum yang kuat dan aparat pelaksana yang paham, berkomitmen dan berada dibawah satu komando

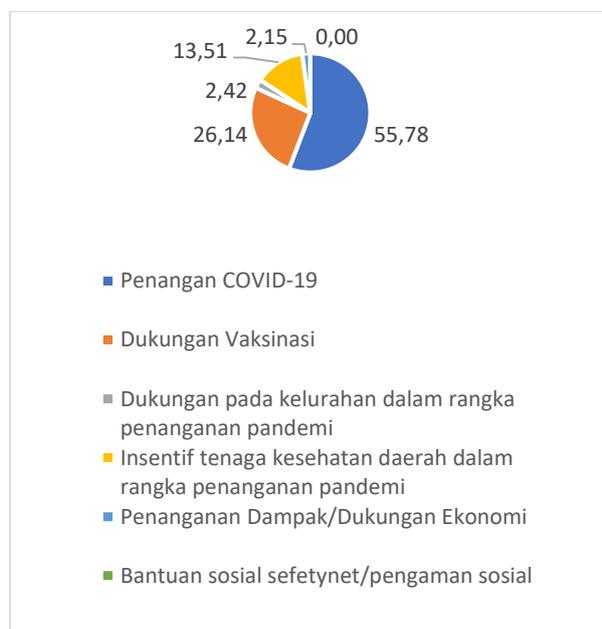
c. Dukungan Finansial

Selain regulasi, memberikan jaminan kepada pasien isoman khususnya terkait kelangsungan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan anggota rumah tangganya merupakan komponen penting dari kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan terkait isoman selain melindungi dampak yang lebih buruk bagi kelompok rentan (Amirudin, 2021). Terkait hal tersebut, pemerintah Kota

Pekanbaru dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 180 Tahun 2020 disebutkan bahwa salah satu hak pasien isoman kepala keluarga di fasilitas isolasi publik adalah bantuan sosial untuk konsumsi harian bagi anggota keluarga pasien isoman namun dukungan tersebut belum terlaksana sebagaimana terlihat pada Gambar 9.

d. Ketersediaan Sarana Prasarana di Fasilitas Isolasi

Keterbatasan sarana dan prasarana serta akses yang jauh, menyebabkan fasilitas isolasi ini menjadi tempat terakhir pilihan pasien untuk melakukan isoman. Kondisi tersebut didukung oleh pernyataan dari petugas dari puskesmas yang lebih merekomendasikan fasilitas isolasi milik pemerintah Provinsi Riau yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan nyaman sebagai tempat isolasi. Namun Dinas Kesehatan Provinsi Riau, berharap agar pemanfaatan fasilitas isolasi Rusunawa Rejosari dapat dimaksimalkan karena keberadaan fasilitas isolasi milik pemerintah Provinsi Riau berfungsi sebagai fasilitas isolasi yang dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat di Provinsi Riau dan tidak hanya sebatas warga masyarakat yang berdomisili di Kota Pekanbaru.



Gambar 9. Program/Kegiatan Penanganan COVID-19 Kota Pekanbaru Tahun 2021

Catatan: Data per 17 Desember 2021

Sumber: BPKAD Kota Pekanbaru 2021, data diolah

e. Ketersediaan dan Validitas Data dan informasi

Data dan informasi merupakan aspek penting dalam proses pengambilan keputusan strategis terutama pada saat pandemi. Menurut Febriani et al., (2020), dalam penanganan pandemi COVID-19, data yang valid dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk perumusan kebijakan. Untuk menghasilkan data yang berkualitas tersebut dibutuhkan sinergi kolaboratif antara pemerintah dengan aktor-aktor lain yang berkepentingan. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi antar aktor dalam pengelolaan data informasi sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Pengelolaan data menjadi kendala dalam pengendalian COVID-19 di Kota Pekanbaru padahal terdapat beberapa aplikasi yang membantu petugas melakukan pendataan dan pelaporan data terkait pengendalian COVID-19 secara berjenjang sampai ke Pemerintah Pusat seperti Aplikasi SILACAK, Aplikasi NAR, Aplikasi Peduli Lindungi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Selain itu Pemerintah Kota Pekanbaru juga membuat Aplikasi CIKPUAN dan ISOMAN yang disebutkan dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 180 Tahun 2021.

Aplikasi SILACAK merupakan sistem informasi pelacakan bagi tracer COVID-19 untuk mendukung *Testing, Tracing dan Treatment (3T)*. Aplikasi NAR (*New All Record*) merupakan Aplikasi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kasus COVID-19 dimulai dari pengambilan spesimen, pemeriksaan spesimen sampai dengan penentuan kasus konfirmasi, sembuh dan meninggal COVID-19. Aplikasi-aplikasi ini terhubung dengan Aplikasi Peduli Lindungi.

Hasil penelitian menemukan bahwa Aplikasi SILACAK belum dimanfaatkan secara optimal oleh petugas *tracer* puskesmas, Babinsa/Babinkamtibmas sehingga pelaporan pelacakan kontak erat dilaporkan secara manual padahal menurut Cencetti et al., (2020) tingkat adopsi aplikasi yang tinggi sangat penting untuk menjadikan pelacakan kontak digital sebagai tindakan yang efektif.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa

penyebab belum optimalnya pemanfaatan aplikasi tersebut disebabkan karena keterbatasan pemahaman SDM terhadap penggunaan aplikasi dan akses internet. Kendala lainnya yaitu data yang diinput terkadang masih belum diisi lengkap akibatnya menyulitkan petugas dalam melakukan pemantauan terhadap pasien isoman di rumah.

Hasil wawancara dengan Tim Satgas COVID-19 Kota Pekanbaru juga menyebutkan bahwa ketidaklengkapan data terutama dalam pengisian alamat lengkap mengakibatkan capaian target pelacakan kontak erat tidak maksimal.

“.....Nggak tahu tracingnya rendah ndak tercapai dengan ada yang menolak diwawancara ada yang ini dan sebagainya dan ada yang tidak melapor ke puskesmas kan? Tetapi dengan sistem NAR kan sudah terpantau semua. Gimana Cuma kadang-kadang dirumah sakit itu juga NARnya itu alamat KTP padahal dia masih ngontrak-ngontrak sehingga nggak ketemu karena alamat adalah alamat KTP padahal dalam kolom itu ada dua yaitu ada alamat sama alamat KTP. Alamat tingggal”.

“.....terutama kontrak tracingnya kita belum pernah mencapai diatas 14, pekanbaru aja belum pernah mencapai 14 malahan targetnya 15 sampai 30 malahan sampai 30 kan. itu rata-rata 15. Kan bisa sampai 30. Dia dari 0-30....”. (Hasil wawancara dengan W, Tim Satgas COVID-19 Kota Pekanbaru, tanggal 17 November 2021)

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan telah membentuk Tim Teknis Pengawasan Data yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang untuk melakukan pengawasan terhadap data pengendalian COVID-19. Tim tersebut diharapkan dapat menghasilkan data yang valid dan aktual sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

Selain data, informasi merupakan unsur penting dalam upaya pengendalian COVID-19. Pengetahuan akan informasi memegang peran penting dalam mempengaruhi perilaku manusia

(Pambudi, Sari, and Aisyah 2021). Masyarakat berupaya mencari informasi terpercaya melalui media, yang dapat memberikan panduan cepat dan kritis terkait pandemi. Namun terkadang informasi yang diperoleh dapat mendorong perilaku yang berdampak negatif pada sistem perawatan kesehatan (Holmes et al. 2020). Kondisi ini sebagaimana disampaikan dalam hasil wawancara berikut:

“..salah satu yang paling susahny adalah perang melawan HOAKS itu nah masyarakat dengan mudah mengakses banyaknya berita-berita miring tentang isoter nah itu yang kendala di lapangan.”(Hasil wawancara dengan M, petugas Puskesmas Rejosari tanggal 17 November 2021)

Berdasarkan uraian tersebut media memiliki dua peran dalam pengendalian COVID-19, yaitu peran positif dan negatif. Peran positif mendorong perubahan perilaku, meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan terhadap COVID-19. Peran negatif mendorong kecemasan dan apatis terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu perlu penguatan peran pemerintah untuk menyampaikan informasi dan sosialisasi yang lebih intens dan berkualitas dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan akhirnya mewujudkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengendalian COVID-19.

f. Koordinasi

Koordinasi yang cepat dan tepat dibutuhkan untuk mencegah peningkatan penularan wabah COVID-19 (Chadsuthi & Modchang, 2021), (Ahmad Fauzi 2020). Hasil penelitian Febriani et al., (2020), tentang evaluasi kesiapan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Pandemi COVID-19 dilihat dari dinamika implementasi menemukan kompleksitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar aktor pengendalian COVID-19 merupakan variabel yang mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk mengambil tindakan yang efektif dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu koordinasi sangat penting dalam upaya pengendalian COVID-19.

Hasil penelitian menemukan pentingnya membangun koordinasi yang baik misalnya koordinasi dalam hal penanganan kontak erat yang harus segera dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 serta koordinasi dalam pengelolaan fasilitas isolasi mandiri.

SIMPULAN

Hasil penelitian menemukan stigma negatif terhadap fasilitas isoman milik pemerintah daerah, jauh dari dukungan keluarga, kehilangan pendapatan dan kenyamanan menjadi alasan masyarakat enggan untuk diisolasi di fasilitas isolasi milik pemerintah daerah. Masih terdapat sarana dan prasarana di fasilitas isoman milik pemerintah daerah yang perlu dibenahi yaitu: sarana hiburan dan internet, olah raga dan pengelolaan sampah dan limbah infeksius.

Pelaksanaan isoman di fasilitas isolasi milik pemerintah daerah memiliki kelebihan dan kekurangan dari sisi pasien maupun pemerintah daerah. Kelebihan pelaksanaan isoman pasien terkonfirmasi COVID-19 di fasilitas isolasi milik pemerintah daerah yaitu terpenuhinya pemenuhan kebutuhan makan, minum, obat-obatan dan vitamin serta mendapatkan pemantauan kesehatan secara berkala namun pemenuhan kebutuhan data dan internet serta hiburan ditempat isolasi masih kurang baik serta belum mendapatkan dukungan dari pemerintah khususnya secara finansial. Kondisi ini akan memperburuk dampak psikologis yang dialami pasien isoman akibat jauh dari dukungan keluarga dan kehilangan pendapatan.

Selanjutnya keuntungan pelaksanaan isoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah adalah memudahkan pemantauan terhadap pasien terkonfirmasi COVID-19 namun membutuhkan sumber daya yang cukup besar baik anggaran, SDM dan sarana prasarana fasilitas isolasi untuk mendukung kebijakan isoman di fasilitas isolasi milik pemerintah daerah. Pelaksanaan isoman di fasilitas isolasi milik pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti partisipasi dan kepatuhan masyarakat, penegakan sanksi, ketersediaan dukungan, ketersediaan sarana dan prasarana di fasilitas isoman, ketersediaan data dan informasi serta koordinasi.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan isoman dan mendukung penegakan sanksi, pemerintah perlu memberikan dukungan kepada pasien isoman dalam bentuk dukungan finansial, psikologis dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Lebih lanjut pemerintah perlu menetapkan kriteria, persyaratan dan besaran dukungan yang diberikan kepada pasien isoman dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan pasien.
2. Fasilitas isoman milik pemerintah khususnya fasilitas isolasi milik pemerintah Kota Pekanbaru perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang nyaman bagi pasien khususnya sarana olah raga dan tempat parkir serta fasilitas pengelolaan limbah dan sampah infeksius.
3. Pemenuhan kebutuhan hiburan dan internet perlu dipertimbangkan mengingat dampak psikologis isolasi terhadap pasien isoman. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi yang disediakan untuk mendukung pelaporan COVID-19 serta meningkatkan kapasitas SDM dalam penggunaan IT.
4. Memperkuat peran pemerintah daerah dalam melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat, menangkis berita HOAKS dan mendorong kepatuhan dan partisipasi publik.
5. Pelaksanaan kebijakan isoman perlu didukung oleh regulasi dan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan tegas.
6. Mensinergikan program dan kegiatan pengendalian COVID-19 yang dilakukan oleh SKPD untuk memaksimalkan dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan isoman.
7. Memperkuat koordinasi antar stakeholder terkait pengendalian COVID-19 untuk mempercepat upaya-upaya pengendalian COVID-19 khususnya dalam melaksanakan 3T, sosialisasi dan edukasi, pengelolaan data dan pelaporan serta pengelolaan fasilitas isoman. Penguatan koordinasi dimulai dengan membangun

pemahaman Tim Satgas COVID-19 terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

8. Pengelolaan sampah harus menjadi bagian dari rencana penanggulangan bencana yang terintegrasi

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru Bapak Masykur Tarmidzi., S.STP., M.Si dalam pelaksanaan penelitian mandiri ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penelitian ini..

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzi. 2020. "Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik dalam Penanganan Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 16.1: 174–78.
- Ambarwati, Wiwi. 2021. "Pembiayaan Pasien COVID-19 Dan Dampak Keuangan Terhadap Rumah Sakit Yang Melayani Pasien COVID-19 Di Indonesia Analisis Periode Maret 2020 – Desember 2020." *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia* 6 (1): 23–37. <https://doi.org/10.7454/eki.v6i1.4881>.
- Amirudin, A. 2021. "The Impact of the Covid-19 Self-Isolation Policy on the Occupations of Vulnerable Groups." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18 (12). <https://doi.org/10.3390/ijerph18126452>.
- Arden, M A, L Lewis C.J. Armitage E. Whittaker, J. Hart, D.B. O'Connor, P. Chadwick, J. Drury, V. Swanson, L. Byrne-Davis, E. McBride, S. Perriard-Abdoh, G W Shorter, T Epton, A Kamal, and & A Chater. 2020. "Encouraging Self-Isolation to Prevent the Spread of Covid-19." <http://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-staying-home-and-self-isolation>.
- Bezerra, C B. 2020. "Psychosocial Impact of COVID-19 Self-Isolation on the Brazilian Population: A Preliminary Cross-Sectional

Analysis." *Saude e Sociedade* 29 (4): 1–10. <https://doi.org/10.1590/S0104-12902020200412>.

- Bhardwaj, Pankaj, Nitin Kumar Joshi, Manoj Kumar Gupta, Akhil Dhanesh Goel, Suman Saurabh, Jaykaran Charan, Prakash Rajpurohit, et al. 2021. "Analysis of Facility and Home Isolation Strategies in Covid 19 Pandemic: Evidences from Jodhpur, India." *Infection and Drug Resistance* 14 (May): 2233–39. <https://doi.org/10.2147/IDR.S309909>.
- Cencetti, Giulia, Gabriele Santin, Antonio Longa, Emanuele Pigani, Alain Barrat, Ciro Cattuto, Sune Lehmann, and Bruno Lepri. 2020. "Using Real-World Contact Networks to Quantify the Effectiveness of Digital Contact Tracing and Isolation Strategies for Covid-19 Pandemic." *Medrxiv*, no. May: 6–11. <http://medrxiv.org/cgi/content/short/2020.05.29.20115915>.
- Chadsuthi, Sudarat, and Charin Modchang. 2021. "Modelling the Effectiveness of Intervention Strategies to Control COVID-19 Outbreaks and Estimating Healthcare Demand in Germany." *Public Health in Practice* 2 (September 2020): 100121. <https://doi.org/10.1016/j.puhip.2021.100121>.
- Escandon-Barbosa, D. 2021. "Factors Affecting Voluntary Self-Isolation Behavior to Cope with a Pandemic: Empirical Evidence from Colombia vs. Spain in Times of Covid-19." *Behavioral Sciences* 11 (3). <https://doi.org/10.3390/bs11030035>.
- Febriani, Dyah, Valeryan Bramasta, and Vanissa Noorizqa. 2020. "Evaluation of Government Policy Readiness in the Management of the Covid-19 Pandemy Viewed From the Implementation of Dynamic Governance." *Research Gate*, no. April.
- Holmes, Emily A., Rory C. O'Connor, V. Hugh Perry, Irene Tracey, Simon Wessely, Louise Arseneault, Clive Ballard, et al. 2020. "Multidisciplinary Research Priorities for the COVID-19 Pandemic: A Call for Action for Mental Health Science." *The Lancet Psychiatry* 7 (6): 547–60. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30168-1](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30168-1).
- Nicola, Maria, Zaid Alsafi, Catrin Sahrabi, Ahmed Kerwan, Ahmed Al-Jabir, Christos Iosifidis, Maliha Agha, and Riaz Agha. 2020. "The Socio-Economic Implications of the

- Coronavirus Pandemic (COVID-19): A Review.” *International Journal of Surgery* 78 (March): 185–93.
<https://doi.org/10.1016/j.ijssu.2020.04.018>.
- Omiya, Y. 2020. “How Much of an Impact Did COVID-19 Self-Isolation Measures Have on Mental Health?” *Asian Journal of Psychiatry*.
<https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102445>.
- Pambudi, Dwi Bagus, Rela Pamungkas Sari, and Risqi Dewi Aisyah. 2021. “Regulatory Evaluation Related to Managing The Spread of Covid-19 in Indonesia.” *Soepra* 7 (1): 136.
<https://doi.org/10.24167/shk.v7i1.2923>.
- Patel, Jay, Genevie Fernandes, and Devi Sridhar. 2021. “Maximising Public Adherence to COVID-19 Self-Isolation in Europe.” *The Lancet Regional Health - Europe* 4: 100089.
<https://doi.org/10.1016/j.lanpe.2021.100089>.
- Reagu, Shuja, Ovais Wadoo, Javed Latoo, Deborah Nelson, Sami Ouanes, Naseer Masoodi, Mustafa Abdul Karim, et al. 2021. “Psychological Impact of the COVID-19 Pandemic within Institutional Quarantine and Isolation Centres and Its Sociodemographic Correlates in Qatar: A Cross-Sectional Study.” *BMJ Open* 11 (1): 52–53.
<https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-045794>.
- Singh, J. A. 2020. “COVID-19: Mandatory Institutional Isolation v. Voluntary Home Self-Isolation.” *South African Medical Journal* 110 (6): 453–55.
<https://doi.org/10.7196/SAMJ.2020V110I6.14840>.
- Umniyati, Helwiyah. 2010. “Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Tahun 2009.” *Journal Kedokteran Yarsi* 18 (1): 9–20.
<https://media.neliti.com/media/publications/105017-ID-kepuasan-pasien-terhadap-pelayanan-tenag.pdf>.
- Wang, Xianliang, Jiao Wang, Jin Shen, John S. Ji, Lijun Pan, Hang Liu, Kangfeng Zhao, et al. 2021. “Facilities for Centralized Isolation and Quarantine for the Observation and Treatment of Patients with COVID-19: Experience from Wuhan, China.” *Engineering*, no. xxxx.
<https://doi.org/10.1016/j.eng.2021.03.010>.
- Zhang, Qingxia, and Dingcheng Wang. 2015. “Assessing the Role of Voluntary Self-Isolation in the Control of Pandemic Influenza